

# ANALISIS KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH TENTANG KULTUR SEKOLAH DAN RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Musdalifah<sup>1</sup>, Robianto<sup>2</sup>, Irfan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Tacipi

e-mail: [musdalifahifa9977@gmail.com](mailto:musdalifahifa9977@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Lamuru

e-mail: [robianto.27499@gmail.com](mailto:robianto.27499@gmail.com)

<sup>3</sup>Fakultas Tarbiyah Prodi MPI Institut Agama Islam Negeri Bone, Melle

e-mail: [irfanprawiraditia@gmail.com](mailto:irfanprawiraditia@gmail.com)

## Abstrak

*Latar belakang penelitian ini, bahwa pendidikan agama merupakan alat yang penting untuk pendidikan karakter pada peserta didik. Selain pembelajaran agama dikelas, tentu banyak faktor yang dapat membantu pembentukan karakter perpeserta didik. Salah satu faktornya adalah lingkungan sekolah yang dapat dipengaruhi oleh kepala sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan relevansi kebijakan kepala sekolah tentang kultur madrasah dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di MIS Poleonro Passapareng. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menekankan pada penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif, untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.*

**Kata kunci :** analisis kebijakan, kultur, pendidikan agama islam

## Abstract

*The background of this research is that religious education is an important tool to give character education to students. Besides learning religion in the class, of course many factors can help the formation of character learners. One factor is the school environment that can influenced by the principal. This study aims to describe the relevance of the principal's policy on madrasa culture to learning Islamic Education in MIS Poleonro Passapareng. This research is a qualitative research that emphasizes field research The approach used is descriptive to create a description systematic, factual and accurate regarding the facts and population of a particular region or area.*

**Keywords:** policy analysis, culture, islamic religious education

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah salah satu pranata sosial yang menawarkan jasa layanan bersifat intelektual, afeksi, psikomotorik, emosional dan menyiapkan masa depan umat. Pendidikan juga merupakan investasi bagi setiap manusia (*human investment*) yang mampu mengantarkan manusia dalam memperkaya wawasan dan meningkatkan mutu hidup pada segala aspek kehidupan, terutama pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memerlukan manajemen yang efektif sehingga mampu mewujudkan budaya dan iklim yang kondusif.<sup>1</sup>

Berbicara tentang budaya atau kultur yang dijalankan dalam sebuah sekolah maka berhubungan dengan pendidikan karakter. Berbicara mengenai pendidikan karakter, sering dihubungkan dengan pendidikan agama. Sejatinya, hal tersebut memang benar. Karena apabila mengulas bahasan tentang karakter, itu artinya membahas mengenai kultur, keteladanan, pembiasaan, serta pola tingkah laku yang telah tertanam didalam diri seseorang sehingga apa yang tercermin dari perilaku sehari-hari itu lah yang dinamakan karakter.<sup>2</sup> Tujuan pendidikan, yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 pasal 3 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, disana disebutkan bahwa salah satu fungsi dari pendidikan nasional adalah untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.<sup>3</sup> Sebutan watak, dapat juga diartikan sebagai karakter, dimana salah satu tujuan dari pendidikan nasional mengarah ke pembentukan karakter yang baik serta memiliki martabat yang tinggi. Dalam pembentukan karakter tersebut perlu adanya pola pengajaran yang dijalankan memiliki relevansi antara kultur sekolah dengan mata pelajaran yang berkaitan langsung dengan tingkah laku murid seperti mata pelajaran pendidikan agama islam atau PAI.

Pendidikan karakter dapat di berikan dari orang tua kepada anaknya, akan tetapi itu tidaklah cukup. Peran serta sekolah juga sangat mempengaruhi karakter peserta didik, karena hampir sebagian besar waktu anak di habiskan di sekolah. Guru merupakan komponen sekolah yang turut memberikan andil yang besar dalam pembentukan karakter peserta didik. Karena lewat guru, ilmu itu akan ditransfer. Selain itu, guru juga dinilai sebagai sosok yang langsung berhadapan dengan peserta didik dalam mentransformasi ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik putra bangsa dengan nilai-nilai konstruktif.<sup>4</sup> Terlepas dari banyak guru yang tidak mempunyai semangat mengabdikan, dan belum pantas untuk digugu dan ditiru. Ternyata sosok guru memang menjadi hal yang penting dalam komponen pendukung dalam pembentukan karakter peserta didik.<sup>5</sup>

Selain sosok guru, ternyata masih banyak faktor lain yang dapat menjadi pengaruh dalam hal pembentukan karakter peserta didik. Diantaranya adalah kepala sekolah. Sayangnya, terdapat oknum kepala sekolah yang kurang dapat menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Padahal Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah mempunyai wewenang untuk menerapkan kebijakan atau peraturan yang diterapkan pada sekolah yang dipimpinnya.

Jika dilihat secara lebih mendalam, kepala sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Selain karena kepala sekolah merupakan pemegang kuasa dalam satu sekolah, kepala sekolah juga dapat memberlakukan aturan-aturan yang dapat membentuk karakter baik

---

<sup>1</sup>Astuti, Astuti, "Pengembangan Budaya dan Iklim Sekolah" *Adaara Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* volume 6, no.1 (2018): 467

<sup>2</sup>Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 2.

<sup>3</sup>Undang-Undang No.20 Tahun 2003 *tentang Sistem pendidikan Nasional*, Bab II pasal 3

<sup>4</sup>Janawi, *Kompetensi Guru, Citra Guru Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.10.

<sup>5</sup>Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h.32.

pada peserta didik yang kemudian di jadikan sebagai kultur atau kebiasaan baik di sekolah tersebut. Tidak hanya peserta didik saja, akan tetapi juga dapat memberikan aturan kepada para guru sehingga pendidikan karakter yang hendak di capai dapat terwujud dengan optimal.

Terdapat tiga kategori kepala sekolah, yang pertama adalah kepala sekolah yang kurang baik, yang kedua kepala sekolah yang biasa saja, dan yang ketiga kepala sekolah yang berprestasi. Perbedaan dari ketiga kategori tersebut terletak pada kontribusi dari kepala sekolah itu sendiri terhadap sekolah yang di pimpin pada khususnya dan untuk dunia pendidikan pada umumnya.

Kepala sekolah yang kurang baik, ialah kepala sekolah yang ketika diangkat sebagai kepala sekolah kinerjanya tidak seperti ketika belum diangkat sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah yang melakukan korupsi terkait dengan pendanaan sekolah juga menjadi salah satu contoh kepala sekolah yang kurang baik, atau hal-hal negatif yang dilakukan seorang kepala sekolah sehingga selama kepala sekolah itu menjabat, tidak ada kontribusi yang baik atau bahkan membuat kepala sekolah tersebut dapat di berhentikan jabatan sebagai kepala sekolah secara sepihak. Contohnya ketika kepala sekolah baru menjabat selama 1 tahun, ia di berhentikan karena alasan kepala sekolah tersebut melakukan kesalahan atau melanggar aturan baik aturan secara tertulis maupun aturan secara tidak tertulis atau norma yang berlaku. Padahal kepala sekolah seharusnya menempuh jabatan selama satu periode yaitu selama 4 tahun.<sup>6</sup>

Kepala sekolah yang kedua yaitu kepala sekolah yang biasa saja. Kepala sekolah ini memberikan kontribusi sebatas apa yang seharusnya dijalankan. Ia tidak memberikan inovasi-inovasi baru yang diterapkan pada sekolah, melainkan hanya sekedar melanjutkan atau tetap menggunakan program dari kepala sekolah yang lama secara sepenuhnya. Orientasinya hanya terletak pada penyelesaian tugas menjadi kepala sekolah dengan tanpa masalah, serta dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai apa yang harusnya dikerjakan. Tidak banyak hal-hal yang di sumbangkan baik dari segi ide, inovasi, dan pembaharuan. Sedangkan kepala sekolah yang ketiga adalah kepala sekolah berprestasi. Kepala sekolah ini tidak hanya menjalankan tugasnya dengan baik, akan tetapi juga memberikan banyak kontribusi serta inovasi baru yang dapat memajukan sekolah dari segi apapun.

Kepala sekolah ini tidak jarang untuk diangkat menjadi kepala sekolah kembali sehingga ia dapat menjabat menjadi kepala sekolah selama dua periode atau selama 8 tahun. Tentu pengangkatan kembali menjadi kepala sekolah bukan tanpa berdasarkan pertimbangan, melainkan melihat pada data kontribusi apa yang telah di lakukan kepala sekolah tersebut baik pada sekolah yang di pimpinnya atau pada dunia pendidikan secara luas. Bahkan ketika kepala sekolah tersebut setelah menjalani dua periode jabatan atau selama 8 tahun, dapat diangkat menjadi pengawas atau supervisor karena prestasi-prestasi yang telah di capai selama ia menjabat sebagai kepala sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan normatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif analisis, yaitu penyelidikan yang kritis terhadap obyek atau data untuk membuat gambaran atau deskripsi secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami bagaimana kultur sekolah.

---

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 tahun 2010, *Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah*, Bab V Pasal 10 Ayat 1.

Data yang diambil dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Kebijakan

#### a. Pendekatan-Pendekatan Analisis Kebijakan

##### 1) Pendekatan Deskriptif

Pendekatan deskriptif adalah suatu prosedur atau cara yang digunakan oleh penelitian dalam ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan murni atau terapan. Istilah lain dari pendekatan deskriptif ini adalah pendekatan positif yang diwujudkan dalam bentuk upaya ilmu pengetahuan dalam menyajikan suatu *state of the art* atau keadaan apa adanya dari suatu gejala yang sedang diteliti dan yang perlu diketahui oleh para pemakai. Tujuan pendekatan deskriptif ini adalah mengemukakan penafsiran yang benar secara ilmiah mengenai gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan umum mengenai suatu permasalahan yang sedang disoroti.

Pendekatan analisis kebijakan menurut William Dunn ada tiga, yaitu empiris, evaluatif, dan normatif. Pendekatan evaluatif yang maksudnya sama dengan pendekatan deskriptif, yaitu menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu upaya yang dilakukan oleh suatu kegiatan atau program. Perbedaan antara evaluatif dan deskriptif terletak pada penggunaan kriteria. Jika pendekatan deskriptif atau pendekatan positif dimaksudkan untuk menerangkan suatu gejala dalam keadaan tiadanya kriteria, maka pendekatan evaluatif juga dimaksudkan untuk menerangkan keadaan dengan menerapkan suatu kriteria atas terjadinya gejala tersebut.

Pendekatan evaluatif lebih menekankan pada pengukuran sedangkan pendekatan deskriptif lebih menekankan pada penafsiran tentang gejala yang terjadi pada yang bersangkutan.<sup>7</sup>

##### 2) Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif yang sering disebut juga dengan pendekatan preskriptif merupakan upaya dalam ilmu pengetahuan untuk menawarkan suatu norma, kaidah atau resep yang dapat digunakan oleh pemakai dalam rangka memecahkan masalah. Tujuan pendekatan ini adalah membantu pemakai hasil penelitian dalam menentukan atau memilih salah satu dari beberapa pilihan cara atau prosedur yang paling efisien dalam menangani atau memecahkan masalah. Norma atau resep tersebut diharapkan dapat mempermudah para pemakai hasil penelitian dalam ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemecahan masalah-masalah sosial atau kemasyarakatan (publik).

Pendekatan normatif dalam analisis kebijakan dimaksudkan untuk membantu para pengambil keputusan dalam memberikan gagasan hasil pemikiran agar para pengambil keputusan tersebut dapat memecahkan masalah kebijakan. Informasi yang normatif dan preskriptif ini biasanya berbentuk alternatif kebijakan sebagai hasil dari analisis data. Informasi jenis ini dihasilkan dari metodologi yang sepenuhnya bersifat rasional yang sesuai, baik dengan argumentasi teoritis, maupun data dan informasi. Informasi yang bersifat normatif ini oleh para penelaah (analisis) sektor pendidikan disebut “informasi teknis”, karena merupakan hasil analisis data berdasarkan informasi yang berkaitan dengan suatu isu kebijakan yang sedang atau ingin disoroti.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Nanang Fattah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 48.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal.49.

## b. Metodologi Analisis Kebijakan

Metodologi analisis kebijakan diambil dari dan memadukan elemen-elemen dari sifat berbagai disiplin : ilmu politik, sosiologi, psikologi, ekonomi, dan filsafat. Analisis kebijakan sebagian bersifat deskriptif, diambil dari disiplin-disiplin tradisional (misalnya ilmu politik) yang mencari pengetahuan tentang sebab, dan akibat dari kebijakan-kebijakan publik. Namun, analisis kebijakan juga bersifat normatif, tujuannya adalah menciptakan dan melakukan kritik terhadap klaim pengetahuan tentang nilai kebijakan publik untuk generasi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Aspek normatif atau kritik nilai dari analisis kebijakan ini terlihat ketika kita menyadari bahwa pengetahuan yang relevan dengan kebijakan mencakup dinamika antara variable tergantung (tujuan) dan variable bebas (cara) yang sifatnya valuatif. Oleh karena itu, pilihan tentang variabel sering kali merupakan pemilihan terhadap nilai-nilai yang saling bersaing.

Metodologi kebijakan seperti dikemukakan diatas, bertujuan menciptakan, menilai secara kritis dan mengkomunikasikan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Dalam hal ini pengetahuan menunjuk pada kepercayaan tentang sesuatu yang secara akal sehat dapat dibenarkan, yang berbeda dengan kepercayaan tentang kebenaran yang pasti atau juga kebenaran dengan probabilitas statistika tertentu.<sup>9</sup>

## c. Kebijakan Kepala Sekolah

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Pada tingkat sekolah, kepala sekolah sebagai figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan sekolah.<sup>10</sup> Adapun syarat yang harus dimiliki kepala sekolah berdasar peraturan ini adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
  - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b) Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi.
  - c) Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah.
  - d) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah.
  - e) Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - f) Memiliki sertifikat pendidik.
  - g) Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-kanak/raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA/TKLB.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,hal.54.

<sup>10</sup>Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), h. 119.

- h) Memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi guru bukan PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang dibuktikan dengan SK inpasing.
  - i) Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya sebagai guru dalam daftar penilaian prestasi pegawai (DP3) bagi PNS atau penilaian yang sejenis DP3 bagi bukan PNS dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 2) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi:
- a) Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah;
  - b) Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.
  - c) Khusus bagi guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah Indonesia luar negeri, harus memenuhi persyaratan khusus tambahan sebagai berikut:
  - d) Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai kepala sekolah/madrasah;
  - e) Mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris dan atau bahasa negara dimana yang bersangkutan bertugas;
  - f) Mempunyai wawasan luas tentang seni dan budaya Indonesia sehingga dapat mengenalkan dan mengangkat citra Indonesia di tengah-tengah pergaulan internasional.

Secara etimologi kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah.<sup>12</sup>

Kepala sekolah itu sendiri berhak untuk menerapkan kebijakan-kebijakan sebagai bagian dari haknya untuk memimpin sebuah sekolah. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi, dan sebagainya).

Dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan kepala sekolah adalah keputusan yang diambil oleh kepala sekolah guna di terapkan pada lingkungan sekolah tempat dimana ia mengemban tugas sebagai kepala sekolah.

## **2. Kultur/Budaya Sekolah**

### **a. Hakikat Budaya Sekolah**

Budaya sekolah/madrasah merupakan bagian dari Budaya korporasi (*corporate culture*). Budaya korporat merupakan Budaya yang dibangun pada institusi atau lembaga yang dimiliki karakteristik tertentu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 482.

Beberapa hal yang menjadi ciri dari korporasi dikemukakan oleh Kasali, sebagai berikut:

- 1) Terdapat pemisahan kekayaan (antara milik individu/keluarga/kelompok dengan milik organisasi sebagai badan hukum).
- 2) Pemisahan tanggung jawab, antara pemilik dan pelaksana.
- 3) Mengutamakan kepentingan pelanggan (*customer satisfaction*).
- 4) Bekerja dengan sistem.
- 5) Adanya pencatatan dan transparansi.
- 6) Adanya pertanggungjawaban (*accountability*).
- 7) Bergerak dengan strategi dan rencana kerja.
- 8) Adanya upaya regenerasi berkelanjutan.<sup>14</sup>

Budaya sekolah merupakan sesuatu yang dibangun dari hasil pertemuan antara nilai-nilai (*values*) yang dianut oleh kepala sekolah sebagai pemimpin dari nilai-nilai yang dianut oleh guru-guru dan para karyawan yang ada dalam sekolah tersebut. Nilai-nilai tersebut dibangun oleh pikiran-pikiran manusia yang ada dalam sekolah. Pertemuan pikiran-pikiran manusia tersebut kemudian menghasilkan apa disebut dengan ‘‘pikiran organisasi’’ (Kasali). Dari pikiran-pikiran organisasi itulah kemudian muncul dalam bentuk nilai-nilai yang diyakini bersama, dan kemudian nilai-nilai tersebut akan menjadi bahan utama pembentuk budaya sekolah/madrasah.<sup>15</sup>

#### b. Faktor- Faktor Penentu Budaya Sekolah

Secara umum faktor-faktor Penentu yang perlu diperhatikan dalam iklim dan budaya sekolah sebagai berikut:

- 1) Tujuan dan sasaran pendidikan nasional dalam pembangunan bukan hanya untuk menciptakan golongan elit dan kaum intelektual, melainkan membentuk manusia Indonesia secara utuh melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi peranannya pada masa mendatang.
- 2) Peserta didik merupakan subjek sekaligus objek pendidikan. Perubahan perilaku peserta didik ditentukan oleh pengalaman belajarnya di samping faktor-faktor bawaan.
- 3) Mendidik merupakan pekerjaan profesional, memberikan petunjuk bahwa tidak setiap orang dapat melaksanakan profesi mendidik (pendidik).
- 4) Isi pendidikan merupakan segala pengalaman yang harus dimiliki peserta didik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai melalui proses pendidikan.
- 5) Keberhasilan pendidikan sangat ditentukan oleh kelengkapan fasilitas dan sumber belajar.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Muhaimin, Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah (Cet. 4; Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2012), h.47.

<sup>14</sup>Ibid.

<sup>15</sup>ibid, h. 48.

<sup>16</sup>Ibid, h. 104.

### c. Asas-Asas Pengembangan Budaya Sekolah

Definisi budaya dan iklim sekolah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan sebuah pola asumsi dasar dalam mengembangkan budaya dan iklim sekolah efektif, sehingga unsur dan prinsip-prinsipnya dianggap valid untuk dilaksanakan secara terus menerus serta diterapkan bukan hanya dianggap sebagai strategi tetapi lebih condong dipandang sebagai budaya. Oleh karena itu peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di sekolah harus senantiasa dibarengi dengan pengembangan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dengan menerapkan nilai-nilai dasar sebagai asas kehidupan sekolah. Secara umum asas-asas pengembangan budaya dan iklim sekolah dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Kerjasama tim (*team work*)

Pada dasarnya sebuah komunitas sekolah merupakan sebuah tim/kumpulan individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk itu, nilai kerja sama merupakan suatu keharusan dan kerjasama merupakan aktivitas yang bertujuan untuk membangun kekuatan-kekuatan atau sumber daya yang dimiliki oleh personil sekolah.

#### 2) Kemampuan

Menunjuk pada kemampuan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab pada tingkat kelas atau sekolah. Dalam lingkungan pembelajaran, kemampuan profesional guru bukan hanya ditunjukkan dalam bidang akademik tetapi juga dalam bersikap dan bertindak yang mencerminkan pribadi pendidik.

#### 3) Keinginan

Keinginan di sini merujuk pada kemauan atau kerelaan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan kepuasan terhadap siswa dan masyarakat.

#### 4) Kegembiraan (*happiness*)

Nilai kegembiraan ini harus dimiliki oleh seluruh personil sekolah dengan harapan kegembiraan yang kita miliki akan berimplikasi pada lingkungan dan iklim sekolah yang ramah dan menumbuhkan perasaan puas, nyaman, bahagia dan bangga sebagai bagian dari personil sekolah.

#### 5) Hormat (*respect*)

Rasa hormat merupakan nilai yang memperlihatkan penghargaan kepada siapa saja baik dalam lingkungan sekolah maupun dengan stakeholders pendidikan lainnya.

#### 6) Jujur (*honesty*)

Nilai kejujuran merupakan nilai yang paling mendasar dalam lingkungan sekolah, baik kejujuran pada diri sendiri maupun kejujuran kepada orang lain. Nilai kejujuran tidak terbatas pada kebenaran dalam melakukan pekerjaan atau tugas tetapi mencakup cara terbaik dalam membentuk pribadi yang obyektif.

#### 7) Disiplin (*discipline*)

Disiplin merupakan suatu bentuk ketaatan pada peraturan dan sanksi yang berlaku dalam lingkungan sekolah. Disiplin yang dimaksudkan dalam asas ini adalah sikap dan perilaku disiplin yang muncul karena kesadaran dan kerelaan kita untuk hidup teratur dan rapi serta mampu menempatkan sesuatu sesuai pada kondisi yang seharusnya.

### 8) Empati (*empathy*)

Empati adalah kemampuan menempatkan diri atau dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain namun tidak ikut larut dalam perasaan itu.

### 9) Pengetahuan dan Kesopanan

Pengetahuan dan kesopanan para personil sekolah yang disertai dengan kemampuan untuk memperoleh kepercayaan dari siapa saja akan memberikan kesan yang meyakinkan bagi orang lain. Dimensi ini menuntut para guru, staf dan kepala sekolah trampil, profesional dan terlatih dalam memainkan perannya memenuhi tuntutan dan kebutuhan siswa, orang tua dan masyarakat.<sup>17</sup>

## 3. Pendidikan Agama Islam

Pendidikan dalam arti sempit adalah proses belajar mengajar di sekolah, sedangkan untuk arti luasnya adalah menjadikan seseorang menjadi lebih dewasa.<sup>18</sup> Agama berarti ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yg berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Islam diartikan sebagai wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.<sup>19</sup>

Pengertian Pendidikan Agama menurut Permenag No 16 Tahun 2010, Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan ketrampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.<sup>20</sup> Pendidikan Islam itu lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan sendiri maupun orang lain, pendidikan islam tidak hanya bersifat teoritis saja, tetapi bersifat praktis. Oleh karena itu Pendidikan Islam adalah sekaligus pendidikan iman dan pendidikan amal.

Dalam kegiatan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) ada enam pendekatan yang digunakan, yaitu:<sup>21</sup>

#### a. Pendekatan rasional

Pendekatan ini adalah pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran yang menekankan pada aspek penalaran.

#### b. Pendekatan emosional

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menggugah perasaan peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya bangsa.

#### c. Pendekatan pengamalan

Pendekatan ini adalah pendekatan yang memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil pengalaman ibadahnya

---

<sup>17</sup>Ibid, h.18-21.

<sup>18</sup>Mohammad Ali, *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian I : Ilmu Pendidikan Teoretis*, (Jakarta:Grasindo,2007), h.147.

<sup>19</sup>Atho Mudzar, *Pendekatan Studi Islam ; Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2007), h.19.

<sup>20</sup>Permenag No 16 Tahun 2010, *Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah*, pasal 1

<sup>21</sup>Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Umum*, (Yogyakarta:teras,2007), h. 19-20.

d. Pendekatan pembiasaan

Pendekatan ini adalah pendekatan yang menekankan pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan hasil pengalaman ibadahnya.

e. Pendekatan fungsional

Pendekatan ini adalah pendekatan yang menyajikan materi pokok dari segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.

f. Pendekatan keteladanan

Pendekatan ini adalah pendekatan yang menjadikan figure guru, orang tua, petugas sekolah, serta anggota masyarakat sebagai cermin dari peserta didik. Sehingga Pendidikan Agama Islam dapat diartikan sebagai pengajaran terhadap ajaran-ajaran Islam baik secara formal maupun non formal yang terjadi di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pendidikan agama hendaknya menjadikan seseorang menjadi bertambah ilmunya atau dengan kata lain bertambah wawasan baik secara teori maupun prakteknya, sehingga dalam melakukan kegiatan keseharian, akan selalu berjalan di jalan yang di ridhai Allah. Konsep pendidikan agama islam sendiri mengusung fokus pada penanaman karakter yang di terapkan di kehidupan sehari-hari, bukan hanya dapat menguasai materi secara teoritis namun juga dapat merealisasikannya di dalam tingkah laku.

## **KESIMPULAN**

Dalam analisis kebijakan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan deskriptif dan pendekatan normatif. Kebijakan kepala sekolah tentang kultur sekolah dapat dikelompokkan kedalam empat hal, yaitu : kebijakan dalam kegiatan intrakurikuler , kegiatan pembiasaan akhlakul karimah, kegiatan ekstrakurikuler, dan hubungan kemitraan sekolah dengan masyarakat.

Kebijakan kepala sekolah tentang kultur sekolah/madrasah sangat relevan dengan pembelajaran. karena kebijakan yang dibuat sangat kental dengan nilai-nilai budaya sehingga sama dengan esensi dari pembelajaran PAI di kelas yang juga menekankan pendidikan karakter pada peserta didik. Selain itu, adanya kebijakan kepala sekolah tentang kulttur sekolah lebih memudahkan peserta didik dalam hal mengamalkan pelajaran PAI terkait dengan pendidikan karakter. Dengan demikian, peserta didik terbiasa untuk melakukan kegiatan yang mengandung nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah.

Setelah melalui proses literatur dan kajian terhadap analisis kebijakan kepala sekolah tentang kultur madrasah dan relevansinya dengan PAI, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu ;

1. Adanya kultur dalam sekolah akibat dari kebijakan kepa sekolah sekiranya membuat pembelajaran PAI di kelas hendaknya di pelajari lebih mendalam, Sehingga wujud dari pengamalan ajaran agama itu dapat terealisasi.
2. Selain lingkungan keluarga dan masyarakat, lingkungan sekolah sangat menentukan terbentuknya karakter peserta didik. Oleh karena itu lingkungan yang baik hendaknya lingkungan yang dapat memberi contoh dan mengajak peserta didik untuk memiliki karakter yang baik pula. Karena

karakter tidak terbentuk secara instan, akan tetapi bertahap dimulai dari kebiasaan sehari-hari peserta didik berupa kultur yang dibangun dalam sekolah

## DAFTAR RUJUKAN

- Astuti, Astuti, "Pengembangan Budaya dan Iklim Sekolah" *Adaara Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* volume 6, no.1 (2018): 467
- Majid, Abdul dan Dian Andayani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Undang-Undang No.20 Tahun 2003 *tentang Sistem pendidikan Nasional*, Bab II pasal 3
- Janawi, *Kompetensi Guru, Citra Guru Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Mulyasa, *Manajemen Pendidikan Karakter*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 28 tahun 2010, *Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah*, Bab V Pasal 10 Ayat 1.
- Fattah, Nanang, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013
- Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Muhaimin, *Manajemen Pendidikan Aplikasinya dalam Menyusun Rencana Pengembangan Sekolah/Madrasah* Cet. 4; Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2012
- Ali, Mohammad , *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan Bagian I : Ilmu Pendidikan Teoretis*, Jakarta: Grasindo, 2007
- Mudzar, Atho, *Pendekatan Studi Islam ; Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 2007 Permenag No 16 Tahun 2010, *Tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah*, pasal 1
- Nazarudin, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Umum*, (Yogyakarta: teras, 2007